

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti telah melakukan analisis serta pembahasan yang secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi sangat penting untuk terus dilaksanakan, karena melalui pendidikan inilah berlangsung pembinaan terhadap para siswa dimana sebagai generasi muda penerus bangsa yang ke depannya akan turut menentukan arah maju mundurnya negara dan bangsa ini. Jika satuan pendidikannya menanamkan dan membina sikap anti korupsi pada siswanya maka akan melahirkan generasi yang dapat mengatakan tidak untuk korupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi, tidak lain untuk membangun karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab agar anak tidak melakukan korupsi dan dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Anak-anak juga dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi, maka dari itu seyogyanyalah jika anak-anak sejak usia dini sebagai generasi muda harapan bangsa perlu ditanamkan dan digali mental antikorupsi serta nilai-nilai kebaikan dalam dirinya karena saat ini pendidikan antikorupsi sudah masuk dalam pendidikan karakter bangsa. Sehingga untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada pengembangan kompetensi (*competence*) kognitif saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh model pendidikan anti korupsi bila di dalam kelas berupa integrasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran PKN, dan model di luar kelas berupa keteladanan guru dan pembinaan karakter guru dan siswa serta kantin kejujuran. Karena pendidikan antikorupsi juga bukan hanya pada pemberian wawasan dan pemahaman saja tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan

perilaku anti korupsi dalam diri siswa. Berangkat dari penjelasan di atas, maka SMA Negeri 8 Bandung mulai tahun 2010 telah menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, dan selama kurun waktu 6 tahun ini penerapan pendidikan antikorupsi berjalan dengan cukup baik apalagi dengan diberikannya kepercayaan sebagai salah satu sekolah pilot project pendidikan anti korupsi di kota Bandung. Hal ini membuktikan bahwa adanya keinginan dan komitmen yang kuat dari pihak sekolah untuk menanamkan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah maupun didalam kelas melalui pembelajaran semua mata pelajaran pada umumnya dan pada mata pelajaran PPKn pada khususnya. Penerapan pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 8 Bandung merupakan bagian dari pendidikan karakter. Pihak sekolah tidak membuat kurikulum tersendiri mengenai pendidikan anti korupsi tetapi didalam pembelajaran di kelas guru mempersiapkan melalui RPP pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi tersebut ke dalam setiap mata pelajaran umumnya dan mata pelajaran PPKn khususnya dan dalam proses budaya sekolah. Pengimplementasian pendidikan anti korupsi dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan pembelajaran sampai dengan tahap evaluasi. Model penerapan pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 8 Bandung dilaksanakan melalui dua model yaitu model pendidikan anti korupsi di dalam kelas (terintegrasi dalam semua mata pelajaran) dan di luar kelas melalui model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah dengan pembinaan karakter guru sebagai teladan dan siswa yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, selain itu melalui pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk pula sehingga untuk menumbuhkan budaya pembiasaan anti korupsi maka di SMA Negeri 8 Bandung telah mendirikan kantin kejujuran. Keberhasilan penerapan atau implementasi pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 8 Bandung tidak lepas dari dukungan Kepala Sekolah, Dewan Guru (umumnya semua guru mata pelajaran dan khususnya guru PPKn), dan seluruh warga sekolah. Selain itu dukungan diberikan oleh Pemerintah Kotamadya Bandung, Dinas Pendidikan Kotamadya

Bandung, dan Kejaksaan Negeri Bandung. Selain dukungan dari berbagai pihak diatas maka ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak sekolah ataupun guru PPKn dalam penerapan pendidikan antikorupsi yaitu kurangnya pemahaman guru untuk mengintegrasikan materi dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran PPKn. Keterbatasan waktu sehingga sulit mengaplikasikan bahan ajar (materi) dan metode dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga mengalami kesulitan saat menyesuaikan kondisi di kelas yang berbeda dengan RPP yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak hanya itu siswapun kesulitan untuk memahami materi Pendidikan Anti Korupsi karena materi yang tidak secara eksplisit ada tercantum pada buku ajar sehingga dalam pengaplikasiannya tidak dilakukan secara baik dan konsisten oleh peserta didik. Melalui upaya pembinaan yang diselenggarakan pihak sekolah untuk membentuk sosok guru yang berkarakter dan memiliki kemampuan sebagai tauladan adalah merupakan faktor utama sekaligus ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pendidikan antikorupsi didalam kelas maupun di luar kelas karena pada dasarnya peran guru dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat dominan dan mempengaruhi perkembangan karakter siswa, maka dari itu selain pembinaan yang sudah terselenggara di sekolah maka gurupun perlu diberikan pelatihan lebih oleh pihak sekolah ataupun Pemerintah Daerah untuk menambah dan melatih wawasannya mengenai pendidikan antikorupsi. Hal ini merupakan solusi untuk mengatasi hambatan penerapan atau implementasi pendidikan antikorupsi.

2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian, secara khusus diperoleh kesimpulan bahwa pada tahap perencanaan pembelajaran adalah guru terlebih dahulu memodifikasi RPP dengan menambahkan nilai-nilai anti korupsi yang hendak dicapai setelah proses pembelajaran. Selanjutnya disusun format RPP yaitu adanya Identitas, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, Materi Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Penilaian remedial dan Pengayaan, tersedianya Media/alat, bahan dan Sumber Belajar yang membantu mendukung proses pembelajaran karakter anti korupsi. Dapat

disimpulkan bahwa guru pada tahap perencanaan sudah cukup baik karena bagian dari RPP sudah lengkap. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan pembelajaran PPKn terlihat bahwa guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Pengembangan karakter anti korupsi pada tahap pendahuluan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena pada tahap ini terdapat nilai-nilai moral yang dapat dijadikan untuk mengenalkan nilai dan membangun kepedulian akan nilai pada siswa. Pada tahap pendahuluan guru dan siswa telah membuat komitmen untuk : datang ke kelas tidak terlambat (Disiplin), berdo'a sebelum belajar (Tanggung Jawab), kelas yang selalu harus terlihat bersih (Disiplin dan tanggung jawab), tidak mencoret-coret meja, kursi dan dinding (Tanggung Jawab), berpakaian sesuai dengan Tata Tertib (Disiplin). Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh guru dan siswa sangat baik karena dari adanya komitmen tersebut secara tidak langsung sudah menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Sedangkan pada tahap kegiatan inti ada beberapa hal yang selalu diarahkan oleh guru berkaitan dengan pendidikan anti korupsi dan hal tersebut sangat baik agar pembelajaran berjalan lancar, diantaranya adalah: jika berpendapat atau mengajukan pertanyaan harus dengan tutur kata yang sopan (Jujur), selalu menghargai teman (Jujur, Tanggung jawab), berkata apa adanya dan tidak menyela (Jujur, Disiplin), saat ulangan tidak mencontek/bertanya pada teman (Jujur), selalu mengerjakan dan menyerahkan tugas tepat waktu (Tanggung Jawab), berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi (Disiplin dan Tanggung Jawab). Selanjutnya pada kegiatan penutup ada beberapa nilai karakter yang dapat dilihat, baik yang dilakukan guru maupun siswa yaitu :siswa dapat menerima kritik, saran baik dari teman maupun guru (Jujur, Disiplin), memberi reward kepada siswa (Jujur), selalu merapikan kelas se usai pembelajaran (Tanggung Jawab), berdo'a dengan khidmat (Tanggung Jawab), mengucapkan salam (Disiplin), keluar atau pulang tepat waktu (Disiplin). Pada bagian ini peneliti menilai apa yang dilakukan guru maupun siswa sudah baik, Dengan demikian bagian penutup tersebut dapat dijadikan motivasi bagi siswa untuk tetap bersemangat pada pertemuan yang akan datang. Keseluruhan tahapan diatas akan terselenggara dengan didukung

oleh materi, metode, media dan sumber belajar yang sesuai dan beragam. Pada saat penyampaian materi guru tidak hanya mengarahkan siswa pada pengetahuan namun guru disini menghubungkan materi yang dipelajari dengan hal-hal atau peristiwa yang sering terjadi di sekitar siswa. Tidak hanya itu guru dalam penggunaan media dan sumber belajar yang digunakan sangat beragam dan mampu mendukung pembelajaran pendidikan anti korupsi. Sedangkan penerapan metode pembelajaran guru menggunakan metode yang beragam disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Dari pemilihan penggunaan metode pembelajaran yang beragam tersebut peneliti menilai sudah cukup baik karena secara tidak langsung membantu siswa untuk menampilkan dan mampu mencapai nilai-nilai karakter anti korupsi. Sedangkan pada tahap evaluasi pembelajaran pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran PPKn terlihat bahwa guru belum secara maksimal melakukan penilaian terhadap siswa, hal ini dikarenakan guru masih melakukan evaluasi yang hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan saja. Sesungguhnya dalam kurikulum 2013 guru sudah saatnya melakukan penilaian autentik dengan mengukurnya melalui pemberian tugas pengamatan atau mengamati setiap tindakan siswa dengan penilaian diri dan penilaian antar siswa agar perkembangan nilai-nilai karakter anti korupsi dapat terlihat. Terdapat beberapa hal yang mendukung terselenggaranya pendidikan anti korupsi harus terus dilakukan sehingga upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat diterapkan pada anak sedini mungkin, yaitu mulai dari usia dini. Hal ini penting karena anak merupakan aset masa depan serta masih bersih dari berbagai pengaruh luar. Faktor Eksternal yang mendukung pendidikan anti korupsi yaitu : Adanya kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang internalisasi nilai-nilai anti korupsi, Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah, Depdiknas dan sekolah sebagai pelaksanaan pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan. Selain itu KPK mengembangkan modul pendidikan anti korupsi untuk sekolah dasar dan

sekolah menengah yang isinya memuat nilai-nilai anti korupsi. Dukungan dari pihak luar yaitu Pemerintah Kotamadya Bandung, Dinas Pendidikan Kotamadya Bandung, dan Kejaksaan Negeri Bandung serta kompetensi sikap dalam Kurikulum 2013. Tidak hanya faktor Eksternal saja melainkan ada juga faktor Internal yang diantaranya adalah bahwa semua guru yang sudah mengikuti workshop pendidikan karakter antikorupsi, adanya komitmen bersama semua pihak untuk penerapan Pendidikan anti korupsi, sarana prasarana yang cukup lengkap, pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi dalam Silabus dan RPP, pembiasaan melalui pembinaan dan contoh sikap guru sebagai suri teladan, penanaman sikap jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran maupun kegiatan sekolah dan menyisipkan nilai karakter anti korupsi serta tersedianya kantin kejujuran. Selain daripada faktor yang mendukung pendidikan anti korupsi, terdapat beberapa persoalan yang menghambat terselenggaranya penerapan pendidikan anti korupsi. Hal yang menghambat tersebut terbagi dalam faktor eksternal yaitu faktor lingkungan yang pasif terhadap perilaku korupsi, kurikulum PPKn yang tidak secara eksplisit memuat pendidikan anti korupsi didalam pelajaran, masih terbatasnya buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Sedangkan faktor internal diantaranya adalah kurangnya kemampuan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengintegrasikan bahan ajar pendidikan anti korupsi, keterbatasan waktu sehingga sulit mengaplikasikan bahan ajar materi) dan metode dalam proses pembelajaran, selain itu, guru juga mengalami kesulitan saat menyesuaikan kondisi di kelas yang berbeda dengan RPP yang telah direncanakan sebelumnya, konsistensi dari penegakan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah sendiri kadang tidak diikuti oleh semua pihak, siswa kesulitan untuk memahami materi Pendidikan Anti Korupsi dan dalam pengaplikasiannya tidak dilakukan secara baik dan konsisten oleh peserta didik, dan kesulitan guru dalam mencari sosok atau tokoh yang bersih dari korupsi.

Dengan terhambatnya pendidikan anti korupsi di sekolah maka akan menimbulkan hal-hal yang mengancam karakter siswa diantaranya adalah Faktor Eksternal yaitu dengan dapat terhambatnya pembentukan karakter karena

penerapan PAK dalam mapel PPKn merupakan sebuah sarana penting dalam pembentukan karakter siswa., pengintegrasian PAK pada mata pelajaran PPKn dan pada semua mata pelajaran tidak dapat direalisasikan, faktor lingkungan yang tidak baik akan dapat mengakibatkan menurunnya perilaku/karakter baik siswa dan pengaruh buruk dari globalisasi akan semakin mudah mempengaruhi dan merubah karakter anti korupsi siswa. Sedangkan faktor Internal yaitu kurang maksimal dalam penyampaian Pendidikan Anti Korupsi di kelas, penegakan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah tidak diikuti oleh semua pihak sehingga perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab hanya sebatas angan semata, siswa kesulitan untuk memahami materi Pendidikan Anti Korupsi dan dalam pengaplikasiannya tidak dilakukan secara baik dan konsisten oleh peserta didik. Agar faktor yang menghambat dapat dicegah maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pada implementasi pendidikan anti korupsi yaitu dengan penerapan Kurikulum 2013 sebagai salah satu strategi pengembangan karakter, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan misalnya workshop, seminar, pelatihan dan sebagainya dari sekolah maupun dari pemerintah atau dinas terkait mengenai pendidikan anti korupsi begitu pula pemanfaatan sarana prasaran sebagai pendukung pembelajaran, penambahan jam pelajaran sehingga membantu mengurangi aktifitas siswa di luar sekolah, pemanfaatan waktu seefektif mungkin, program pembiasaan yang tengah dilaksanakan selanjutnya dalam pembelajaran selalu memberikan contoh dan mengarahkan siswa untuk bersikap anti korupsi, memodifikasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PPKn, pembinaan karakter kepada siswa yang dilakukan sekolah, pembinaan yang dilakukan pihak sekolah kepada para guru untuk senantiasa menjadi suri tauladan bagi para peserta didik dan konsisten memberikan reward and punishment.

B. Rekomendasi

Dari hasil kesimpulan penelitian diatas, maka rekomendasi ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

Gita Yuliani, 2016

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA MATA PELAJARAN PPKN DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER JUJUR, DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) Kepada pemerintah idealnya jika pendidikan antikorupsi dapat disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat agar tujuan pendidikan antikorupsi bisa terlaksana secara maksimal dan tidak hanya siswa saja yang bersikap dan berperilaku antikorupsi tetapi seluruh masyarakat Indonesia.
- 2) Kepada kepala sekolah SMA Negeri 8 Bandung, pihak sekolah tetap memberikan pembinaan karakter dan kesempatan kepada guru untuk mengikuti seminar maupun pelatihan tentang pembelajaran antikorupsi berupa manajemen sekolah yang transparan.
- 3) Kepada guru PPKn, untuk selalu meningkatkan pemahaman baik secara konseptual, teoritis, ataupun praktis tentang pendidikan antikorupsi agar lebih mudah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dan selalu memberikan tauladan pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran PPKn serta dapat konsisten dalam menerapkan anti korupsi melalui reward and punishment.
- 4) Siswa sebaiknya bisa aktif pada saat kegiatan belajar PPKn dan bisa menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya nilai kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab saja akan tetapi nilai anti korupsi yang lain seperti sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dan kerja keras.

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan maka bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai hal yang sama, maka penelitiannya dapat mengambil sampel yang lebih besar dengan metode penelitian yang berbeda, sehingga akan diperoleh data yang lebih banyak dan lebih luas serta peneliti dapat melakukan eksperimen pendidikan anti korupsi di sekolah yang belum menerapkan konsep pendidikan anti korupsi didalamnya atau dengan membandingkan pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dengan mata pelajaran lain.